

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH**



**LAPORAN KINERJA (LAKIN) 2024
KPP PRATAMA BANDA ACEH**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) yang dilakukan oleh setiap unit instansi pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban yang pada akhirnya dapat diambil suatu penilaian kinerja atas apa yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan kerja tahun-tahun berikutnya. Secara umum, pencapaian dari pelaksanaan sasaran strategis meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya LAKIN, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh sebagai instansi pemerintah yang menjalankan **good governance** diharapkan dapat terwujud. LAKIN bukan hanya menggambarkan apa, bagaimana, dan keberhasilan apa saja yang telah dicapai, namun juga menjelaskan kegagalan pencapaian target dan hal-hal apa saja yang menjadi penyebabnya. LAKIN ini juga dapat digunakan oleh instansi yang menjadi atasan langsung dan pihak lain yang berkepentingan untuk lebih menyempurnakan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

Banda Aceh, 30 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Muhammad Taufiq Hidayatulloh Al Mahdy
NIP 197307241994031002



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
1. TUGAS	6
2. FUNGSI	6
3. STRUKTUR ORGANISASI	7
C. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 10
A. PERENCANAAN STRATEGIS	10
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	10
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
B. REALISASI ANGGARAN	18
 BAB IV : PENUTUP	 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pengembangan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Seiring dengan terselenggaranya sistem reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta modernisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh sebagai unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di sektor perpajakan sesuai prinsip-prinsip *good governance* membuat pertanggungjawaban yang tersaji dalam LAKIN.

LAKIN yang berisi visi, misi, strategi dan acuan, merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, sehingga dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini maupun masa yang akan datang dan memenuhi harapan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, dengan tersusunnya LAKIN yang meliputi perencanaan, strategi, visi dan misi diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai sehingga mampu mengamankan dan menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, mengemban tugas mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berlokasi di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No. 82, Kelurahan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh didukung oleh 99 pegawai dengan rincian 1 pegawai Eselon III menjabat sebagai Kepala Kantor, 9 pegawai Eselon IV menjabat sebagai Kepala Subbagian/Kepala Seksi, 13 pegawai menjabat sebagai Fungsional Pemeriksa, 3 pegawai menjabat sebagai Fungsional Penyuluh, 1 Pegawai menjabat sebagai Asisten Fungsional Penyuluh, 38 Pegawai menjabat sebagai Account Representative dan 34 pegawai sebagai Pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh memiliki target capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp1.908.201.793.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dalam Menjalankan tugasnya KPP Pratama Banda Aceh selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal, mencakup penyuluhan yang akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berikut Komposisi Organisasi KPP Pratama Banda Aceh per 31 Desember 2024 :

Struktur Organisasi	Anggota
• Kepala Kantor	• 1 Eselon III
• Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	• 1 Eselon IV • 1 Sekretaris • 1 Bendaharawan • 7 Pelaksana
• Seksi Penjaminan Kualitas Data	• 4 Pelaksana
• Seksi Pelayanan	• 1 Eselon IV • 10 Pelaksana • 3 Penyuluh Pajak Ahli Pertama • 1 Asisten Penyuluh Pajak Penyelia

• Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian	• 1 Eselon IV • 7 Pelaksana
• Seksi Pengawasan I	• 1 Eselon IV • 8 <i>Account Representative</i> • 1 Pelaksana
• Seksi Pengawasan II	• 1 Eselon IV • 6 <i>Account Representative</i> • 1 Pelaksana
• Seksi Pengawasan III	• 1 Eselon IV • 6 <i>Account Representative</i> • 1 Pelaksana
• Seksi Pengawasan IV	• 1 Eselon IV • 6 <i>Account Representative</i>
• Seksi Pengawasan V	• 1 Eselon IV • 6 <i>Account Representative</i>
• Seksi Pengawasan VI	• 1 Eselon IV • 6 <i>Account Representative</i> • 1 Pelaksana
• Fungsional Pemeriksa	• 13 Fungsional Pemeriksa

1. TUGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Pasal 58 menyebutkan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Pasal 59 menyebutkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

menyelenggarakan fungsi berikut :

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur organisasi pada KPP Pratama terdiri dari seksi-seksi yang menjadi satu kesatuan dari suatu organisasi sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI.

Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263//SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta sesuai ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi DJP, dan mendukung tujuan Kementerian Keuangan serta mendukung Strategi Nasional periode 2021–2024, DJP telah menetapkan lima sasaran strategis menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2021 – 2024 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
3. Organisasi dan SDM yang optimal;
4. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
5. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya perencanaan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Betapa pentingnya Renstra DJP Tahun 2021-2024 menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) lima tahun ke depan. Adanya Renstra DJP 2021-2024 akan memberikan arah dan tujuan yang jelas, memberikan pemahaman terhadap pimpinan dan bawahan sehingga bisa saling bekerja sama demi terealisasinya tujuan organisasi.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KPP Pratama Banda Aceh memiliki target penerimaan pada tahun 2024 sebesar Rp1.908.201.793.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang berasal dari penerimaan pajak *extra effort* dan *voluntary payment*. Selain dari penerimaan, pengukuran nilai kinerja organisasi merupakan hasil penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar menunjang tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi. Penjabaran Sasaran Strategis KPP Pratama Banda Aceh tahun 2024 yang terbagi menjadi empat perspektif dapat dilihat pada tabel berikut:

--	--	--

Kode SS/IKU		
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00

9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh beberapa seksi terkait dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan.

Program ditentukan dari nilai kinerja organisasi yang ditetapkan, ada 9 jenis program yaitu :

- i. Penerimaan Pajak Negara yang Optimal.
- ii. Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi.
- iii. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif.
- iv. Pengawasan Wajib Pajak yang Efektif.
- v. Penegakan Hukum yang Efektif.
- vi. Data dan Informasi yang Berkualitas.
- vii. SDM yang Kompeten.
- viii. Organisasi yang *fit for purpose*.
- ix. Pengelolaan Anggaran yang berkualitas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Banda Aceh tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berikut ini adalah tabel indeks capaian kinerja organisasi KPP Pratama Banda Aceh.

1. Realisasi Target Kinerja Organisasi

Berikut capaian kinerja organisasi KPP Pratama Banda Aceh tahun 2024:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>		30,00%			100,72
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				100,72
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,60%	57,78%	100,60
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,87	42,22%	100,87
<i>Customer Perspective</i>		20,00%			103,27
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				105,89
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,60%	57,78%	100,60
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,13%	42,22%	113,13
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				100,64
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,64%	100,00%	100,64
<i>Internal Process Perspective</i>		25,00%			116,93
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				114,16
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,32%	50,00%	108,32
5	Persentase pengawasan pembayaran masa				120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,20%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				117,78
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,53%	33,33%	119,53
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,85%	33,33%	119,85
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,97%	33,33%	113,97
7	Penegakan hukum yang efektif				112,69

7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	113,22%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas				120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	71,20%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				25,00%	116,17
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				112,34
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,49	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,66	33,33%	110,19
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,43	33,33%	109,36
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	97,47	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi					109,14

Seluruh IKU KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2024 tercapai (20 IKU).

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja KPP Pratama Banda Aceh Tahun 2024 dengan Tahun 2023.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	104,07%	100,60%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	105%	100,87
<i>Customer Perspective</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	109,36%	100,60%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	103,78%	113,13%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	60,26%	100,64%
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	84%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	82,85	108,32%

5	Persentase pengawasan pembayaran masa		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	114,90%	118,20%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	119,53%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120%	119,85%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	IKU tidak ada	113,97%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	IKU tidak ada	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	96,72%	113,22%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	IKU tidak ada	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	124,07%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100%	71,20%
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	IKU tidak ada	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	94,86	93,66
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	IKU tidak ada	98,43
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,96	97,47
TOTAL NKO		104.10	109.14

Dari table di atas, terdapat beberapa IKU yang ada di tahun 2024 tetapi IKU tersebut tidak ada di tahun 2023.

3. Upaya-Upaya Extra Effort yang Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja.

Extra effort merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas. Secara prinsip, *extra effort* merupakan ikhtiar KPP Pratama Banda Aceh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menggali potensi penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Banda Aceh untuk menunjang kegiatan penggalian potensi, meningkatkan kepatuhan wajib dan penerimaan tahun 2024 antara lain:

- Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan lebih awal;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah agar semua pegawainya melaporkan SPT Tahunan;

- c) Membuka layanan jemput bola di tempat Wajib Pajak Swasta maupun Instansi Pemerintah yang memiliki banyak karyawan/pegawai;
- d) Menghimbau kepada Wajib Pajak yang ada kegiatan usaha agar melaporkan SPT Tahunan;
- e) Melakukan pengawasan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan data-data yang tersedia ataupun melalui kegiatan pengamatan di lapangan;
- f) Melakukan pengawasan tahun berjalan dengan memperhatikan data yang tersedia;
- g) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masa dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT masa;
- h) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah, terutama terkait pengawasan terhadap bendahara;
- i) Kegiatan pengawasan dilakukan secara tuntas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan potensi dan batas waktu yang telah disediakan;
- j) Proaktif kepada wajib pajak yang telah dilakukan himbauan sehingga fungsi pengawasan dapat dipadukan dengan fungsi edukasi agar kepatuhan dapat meningkat;
- k) Melakukan penelitian terhadap data yang tersedia untuk dapat menentukan tingkat keakuratan data untuk dapat diusulkan pemeriksaan data konkret;
- l) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan data konkret sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- m) Memonitor realisasi pembayaran atas hasil pemeriksaan data konkret;
- n) Melakukan pengamatan lapangan terhadap perkembangan wilayah kerjanya masing-masing;
- o) Memanfaatkan data yang tersedia untuk dapat melakukan kegiatan ekstensifikasi.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Penerimaan KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2024 mencapai target. IKU mencapai target pada triwulan IV tahun 2024 dengan realisasi IKU sebesar 100,60% dari target 100% dengan rincian realisasi sebesar Rp1.919.706.319.185,- dari target sebesar Rp1.908.201.793.000.

Selama 2024 telah dilakukan pengawasan kewajiban perpajakan berbagai sektor, pengumpulan data, pengawasan WP Bendahara, menindaklanjuti data pemicu, dan penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan WP.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Banda Aceh didukung oleh 99 pegawai per 31 Desember 2024 serta didukung dengan anggaran sebesar Rp7.064.116.000 untuk penyelenggaraan perpajakan yang dipercayakan pada KPP Pratama Banda Aceh.

Sarana dan prasarana penunjang seperti gedung kantor, perlengkapan dan sistem jaringan dan aplikasi penunjang yang baik yang ada di KPP Pratama Banda Aceh merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya penerimaan yang sangat penting demi lancarnya pelaksanaan kegiatan penerimaan. KPP Pratama Banda Aceh berusaha memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki.

6. Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun dalam Pencapaian Kinerja

Dalam melaksanakan upaya-upaya mencapai keseimbangan yang optimal antara meminimalisir potensi kerugian (risiko) dan upaya memaksimalkan kemungkinan keuntungan (*opportunity*) di tahun 2025, KPP Pratama Banda Aceh telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi risiko, antara lain:

- Mengundang Wajib Pajak prioritas dan Wajib Pajak besar kewilayahan untuk melakukan konseling atas kewajiban perpajakan.
- Memaksimalkan tindakan surat paksa dan pemblokiran (penagihan aktif).
- Memaksimalkan pemeriksaan pada tahun berjalan.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan edukasi Wajib Pajak.
- Melakukan visit Wajib Pajak dalam rangka pemutakhiran data.
- Bekerja sama dengan Pemda setempat dan memberikan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD
- Monitoring dan evaluasi rutin.

Kegiatan mitigasi risiko yang telah dilakukan dengan maksimal dapat meningkatkan realisasi IKU nilai kinerja organisasi KPP Pratama Banda Aceh.

7. Rencana Aksi

- a. Identifikasi terkait sumber sumber penerimaan terbesar
- b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui kegiatan

- pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penagihan, dan edukasi
- c. Pengawasan terhadap RSUZA, RS Jiwa, DISPORA, SEKDA, PUPR, Dinas Pendidikan, PERKIM, dan SNVT
- d. Mitigasi penurunan penerimaan pajak dari bendahara terkait PON (Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Aceh dan PB PON)
- e. Pengawasan dari KMS
- f. Membuat pojok pajak
- g. Penggalan WP Sektoral

A. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Banda Aceh memperoleh anggaran melalui DIPA sebanyak Rp7.064.116.000 (*Tujuh Milyar Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah*) untuk memenuhi output dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi KPP Pratama Banda Aceh sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Realisasi belanja KPP Pratama Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.445.652.363 (*Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) atau 91.24% dari anggaran. Berikut ini uraian output belanja KPP Pratama Banda Aceh Tahun Anggaran 2024:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	015-119642	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH	001	PAGU	928.940.000	5.933.413.000	201.763.000	0	0	0	0	0	0	7.064.116.000
				REALISASI	905.225.000	5.341.770.863	198.656.500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.445.652.363
				PERSENTASE	(97.45%)	(90.03%)	(98.46%)							(91.24%)
				SISA	23.715.000	591.642.137	3.106.500	0	0	0	0	0	0	618.463.637
TOTAL				PAGU	928.940.000	5.933.413.000	201.763.000	0	0	0	0	0	0	7.064.116.000
				REALISASI	905.225.000	5.341.770.863	198.656.500	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	6.445.652.363
				PERSENTASE	(97.45%)	(90.03%)	(98.46%)							(91.24%)
				SISA	23.715.000	591.642.137	3.106.500	0	0	0	0	0	0	618.463.637

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2024 merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagai pertanggung jawaban atas kinerja KPP Pratama Banda Aceh yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh dalam Tahun Anggaran 2023, realisasi penerimaan mencapai 100,60%. Realisasi IKU KPP Pratama Banda Aceh memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109.14.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh telah menyusun rencana kinerja untuk mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 2025 sebagaimana yang telah ditargetkan diharapkan Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan maupun pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh sehingga dapat memberikan saran dan masukan yang berguna bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.